

Judul : Novanto Pertimbangkan Justice Collaborator
Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Novanto Pertimbangkan Justice Collaborator

● MABRUROH, SANTI SOPIA

Tim kuasa hukum mengklaim, penerima aliran dana lebih dari tiga anggota DPR.

JAKARTA — Sidang lanjutan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik akan digelar pada Rabu (20/12). Saat ini, tim kuasa hukum tengah menyusun materi eksepsi yang akan dibacakan dalam sidang nanti. Salah satu tim kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, mengatakan, dalam eksepsi nanti tim akan fokus pada prosedural dan material. Termasuk material perihal hilangnya tiga nama politisi PDIP dalam dakwaan kliennya.

"Kami akan dalam dakwaan KPK yang menyebutkan beberapa nama itu," kata Firman dalam sambungan telepon, Senin (18/12).

Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat membingungkan dengan membuat dakwaan berbeda antara satu tersangka dengan yang lain. Oleh karena itu, tim kuasa hukum akan mendalami dan akan mencoba menguraikannya dalam pembelaan. "Struktur dakwaan ini membingungkan ya, nah akan kami uraikan di nota keberatan nanti," kata

Firman.

Tim kuasa hukum Novanto mencurigai dakwaan yang dibuat KPK untuk kliennya bersifat spekulatif. Sehingga, ada nama-nama yang hilang dalam dakwaan tersebut. Menurut Firman, sangat tidak mungkin untuk kasus yang sama bisa berbeda isi dakwaannya.

Firman menilai, apa yang dilakukan KPK tidak dibenarkan dalam hukum. Karena dengan dakwaan yang berubah-ubah justru akan membingungkan dan akan sulit untuk dijadikan pegangan. "Dakwaan itu tidak boleh ada yang semacam ini (berubah-ubah), dakwaan yang berubah-ubah kan sulit untuk jadi pegangan, tentu itu akan jadi keberatan eksepsi kita," ujarnya.

Firman mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan Novanto soal pengajuan sebagai *justice collaborator* pada KPK. Namun, dia belum dapat memastikan apakah hal itu dapat direalisasikan. "Kita konsultasi dengan Pak Novanto nanti," katanya.

Anggota tim kuasa hukum Novanto yang lain, Maqdir Ismail memastikan Novanto akan membongkar nama-nama terduga penerima aliran dana proyek KTP-el yang hilang dalam dakwaan. Nama-nama tersebut akan disertakan Makdir dalam eksepsi Novanto yang akan dibacakan di sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi nanti.

"Kita lagi berusaha selesaikan sampai besar. Kita persiapkan nama-nama penerima uang yang hilang dan ketidaksaan yang menjadi teman peserta dari masing-masing dakwaan," ujar Makdir pada *Republika*, Senin (18/12).

Menurut tim kuasa hukum, nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan KTP-el periode 2009-2014 bukan hanya tiga orang. Mereka yang terlibat namun hilang dari dakwaan terdakwa Setya Novanto dari Perkara Irman dan Sugiharto sebagai penerima uang lebih dari tiga orang.

Ada tiga nama yang paling menonjol yang hilang dalam dakwaan Novanto di sidang perdana kemarin. Tiga nama itu seluruhnya adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Bendahara Umum PDIP Olly Dandokambey. Dalam pengadaan proyek KTP periode 2009-2014, Ganjar dan Yasonna duduk di bangku Komisi II DPR RI sedangkan Olly menjabat sebagai Badan Anggaran DPR yang mana ketiganya diduga menerima suap dari proyek KTP.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, KPK akan terus mengusut pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus korupsi proyek KTP-el. Menurut Saut, KPK bekerja atas hukum, hukum pembuktian, ma-

ka penyebutan nama memerlukan kehati-hatian.

"KPK senantiasa berupaya fokus pada kasus agar prosesnya berjalan cepat guna memiliki kecukupan bukti dan proses peradilanannya," kata dia.

Sementara, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, hilangnya nama tiga politikus PDIP karena KPK fokus untuk membuktikan keterlibatan Novanto dalam megaprojek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. "Tentu saat ini kita fokus membuktikan dan lebih menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto," ujar Febri.

Menurut Febri, konstruksi hukum dalam kasus korupsi KTP-el ini masih tetap sama. Yaitu, jika yang dipersoalkan adalah anggota DPR, dibuat dalam klaster terpisah yang disebutkan dugaan penerimaan oleh sejumlah anggota DPR dengan jumlah yang spesifik dalam dakwaan. Jadi, Febri mengklaim, sebenarnya itu sudah dituangkan terkait dengan fokus KPK.

Dia menegaskan, KPK akan terus mengusut dan mengejar siapa saja yang memang terlibat dalam korupsi KTP-el.

"Pihak-pihak lain yang juga diduga menerima aliran dana tentu akan terus kita kejar, kita proses lebih lanjut sepanjang bukti permulaan yang cukup untuk awal dari penyelidikan itu bisa dilakukan," katanya.

■ ed: agus raharjo